

Dukun Bunuh Selingkuhan, Lalu Pura-pura Kesurupan

EMPAT LAWANG (IM) - Yuli Marlina (35) janda 4 anak, warga Desa Tanjung Ning Lama, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang dilaporkan hilang sejak 1 Agustus 2023 lalu ditemukan tewas di semak-semak dengan kondisi mengenaskan tanpa busana.

Polisi mendapati informasi bahwa jenazah korban berhasil ditemukan berkat bantuan seorang pria yang dikenal di desa mereka sebagai dukun.

Polisi yang curiga dengan informasi warga kemudian melakukan interogasi terhadap pelaku, hingga akhirnya Eko Sugianto (30) alias Jaka mengaku bahwa dirinyalah yang membunuh korban.

Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, Ipda Adin Riyanto mengatakan, pria beristri dan mempunyai 2 orang anak ini mengaku awal berkenalan dengan korban melalui Facebook hingga menjalin hubungan asmara dengan korban yang masih tetangganya sejak 1 bulan terakhir.

Pembunuhan terhadap Yuli berawal pada 1 Agustus sekitar pukul 16.00 WIB. Pelaku bertemu korban di areal perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumah korban. Saat itu korban meminta uang sebesar Rp2 juta rupiah kepada pelaku dan jika permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan menyebarkan foto mesra ke medsos.

"Pelaku kemudian merayu korban untuk berhubungan intim dan akan memberikan uang. Selesai melakukan hubungan intim korban kemudian menagih uang yang dijanjikan pelaku. Merasa dibohongi korban kemudian marah hingga terjadi cekok mulut di antara keduanya," kata Ipda Adin, Selasa (29/8).

Ipda Adin melanjutkan, pelaku yang kesal mengecek leher korban selama 30 menit hingga tewas. Kemudian mayat korban diseret pelaku ke dalam semak belukar. Sebelum meninggalkan lokasi tersangka membuang pakaian korban ke sungai dan mengambil ponsel milik korban untuk menghilangkan jejak.

"Satu hari sebelum jenazah korban ditemukan, pelaku mengajak keluarga korban melakukan ritual untuk mengetahui keberadaan korban. Pelaku yang berpura-pura kesurupan kemudian menggambar peta lokasi keberadaan korban," ucapnya.

Kata Ipda Adin, terungkapnya kasus pembunuhan berawal dari kecurigaan polisi terhadap pelaku yang mengetahui persis lokasi keberadaan korban. Kemudian dilakukan interogasi dan memeriksa ponsel milik pelaku.

"Dari ponsel pelaku polisi akhirnya mendapatkan petunjuk berupa percakapan SMS tersangka dengan seseorang yang dalam SMS tersebut tersangka berniat kabur," ujarnya.

Sohar, orang tua korban menuturkan, pada hari Selasa 1 Agustus sekitar pukul 11 siang korban Yuli Marlina keluar rumah dan berpamitan dengan anaknya hendak pergi ke kebun.

Namun hingga menjelang malam korban tak kunjung pulang, keluarga kemudian melapor ke Polsek Tebing Tinggi hingga pada 16 Agustus korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan tanpa busana di semak-semak yang hanya berjarak 500 meter dari rumah korban.

Dari informasi orang tua korban diketahui bahwa istri tersangka merupakan keponakan korban. Korban merupakan bibi dari istri tersangka Dukun Jaka. • **Ius**

FOTO: ANTARA



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA DI POLDA JATIM

Petugas kepolisian menghadirkan tersangka saat rilis ungkap kasus dan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (29/8). Polda Jatim memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu seberat 80,674 kg dan pil ekstasi sebanyak 13.272 butir dari tiga kasus pada periode 14 - 25 Agustus 2023 dengan total tersangka sebanyak 661 orang.

Saksi dan Korban Kasus Pelecehan Miss Universe 2023 Datangi Polda Metro

JAKARTA (IM) - Beberapa orang finalis Miss Universe 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan seksual di ajang kontes kecantikan tersebut, mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (29/8) siang.

Mellisa Angraini, pelapor sekaligus kuasa hukum para korban menyampaikan, pihaknya dipanggil penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Selain korban, kata Mellisa, polisi juga bakal turut memanggil saksi.

"(Pemanggilan) Jam 1. Mengambil keterangan korban dan saksi dalam proses penyidikan (BAP)," ujar Mellisa.

Sebelumnya, PT Capella Swastika Karya selaku Event Organizer (EO) Miss Universe 2023 resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin (7/8/2023). PT Capella Swastika Karya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe 2023.

Mellisa Anggraeni menjelaskan bahwa ke-

jadian pelecehan tersebut terjadi pada 1 Agustus 2023 lalu.

"Tanggal 1 Agustus 2023 sudah terjadi sebuah peristiwa di mana tiba-tiba dilakukan *body checking* terhadap para kontestan di luar agenda resmi. Di luar espektasi di luar pengetahuan para korban menyampaikan, pihaknya dipanggil penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Selain korban, kata Mellisa, polisi juga bakal turut memanggil saksi.

Saat melakukan *body checking* tersebut para peserta difoto telanjang. Melissa mengatakan, tindakan tersebut melukai martabat perempuan. Termasuk peserta Miss Universe 2023.

Saat melaporkan PT Capella Swastika Karya, pihaknya menyerahkan sejumlah barang bukti. Termasuk rekaman foto dan video.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA. Mellisa melaporkan PT Capella Swastika Karya dengan pasal 4, 5, 6, 14, 15 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. • **Ius**

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



PERESMIAN SAMSAT DIGITAL DI BANDUNG

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi (ketiga kanan) dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantoni (kedua kanan) meresmikan Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/8). Pemrov Jawa Barat bersama Jasa Raharja dan Korlantas Polri meresmikan Samsat Digital yang ditujukan guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari semula dua jam menjadi dua puluh menit.

Irjen Napoleon Hanya Disanksi Demosi, Polri Dianggap Permisif ke Anggotanya

Napoleon terbukti melakukan korupsi, namun sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya memberi sanksi demosi selama 3 tahun 4 bulan.

JAKARTA (IM) - Irjen Napoleon Bonaparte (NB) hanya diberi sanksi demosi oleh sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Atas putusan itu, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri yang terjerat kasus dugaan kasus suap dan penganiayaan terhadap M Kece, tidak mengajukan banding.

Saudara NB (Napoleon Bonaparte) menerima atas keputusan yang diberikan dan menyatakan tidak banding," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Selasa (29/8).

Sidang etik terhadap Irjen Napoleon digelar pada Senin (28/8) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Hasil sidang etik memutuskan memberi sanksi berupa demosi selama tiga tahun empat bulan.

Sidang etik terhadap Napoleon diketuai oleh Irwansu Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Wadankorbrimob Polri Irjen Pol Imam Widodo selaku wakil ketua komisi. Kemudian, anggota komisi sidang yakni Irjen Syahardianto (Kadiv Propam Polri), Irjen Hendro Pandowo (Sahli Sosbud Kapolri), dan Irjen Pol Hary Sudwijanto (Kakorbinmas Baharkam Polri).

Selain demosi, komisi sidang etik menetapkan perbuatan Napoleon sebagai tindakan tercela.

"Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan," tuturnya.

Napoleon terbukti melakukan tindak pidana Korupsi terkait penerbitan penghapusan Interpol Red Notice atas nama Joko Tjandra. Ia juga telah mendapat vonis pidana penjara selama empat tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.

Napoleon dijera Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Perkap Nomor 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Perlu diketahui bahwa Irjen Napoleon akan masuk masa pensiun pada bulan November 2023. Ia juga telah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur sejak 17 April 2023. Jenderal bintang dua itu dipenjara karena dinyatakan terbukti menerima suap taipan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Napoleon juga dinyatakan bersalah karena menganiaya terdakwa penitensi agama M Kace di Rutan Bareskrim Polri.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terpidana Irjen Napoleon Bonaparte (NB) hanya formalitas semata.

"Terkait hasil sidang KKEP pada Irjen NB yang hanya memberi sanksi demosi tiga tahun empat bulan, artinya sidang KKEP hanya melakukan formalitas dan prosedural saja," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (29/8).

Bambang juga menilai pemberian sanksi demosi terhadap Napoleon justru menjadi beban tambahan atau pekerjaan rumah (PR) bagi Kapolri yang sedang membangun kepercayaan publik. Dia sangat menyayangkan sanksi yang ditetapkan Komisi KKEP hanya berupa demosi. Padahal Napoleon melakukan perbuatan korupsi berupa

suap untuk pengurusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Atas dasar peraturan mana keputusan demosi tersebut diberikan pada terpidana kasus korupsi yang melanggar undang-undang maupun mencemarkan nama baik institusi Polri?" kata Bambang dengan nada bertanya.

Peraturan Polisi (Perpol) 7 Tahun 2022 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 telah jelas mengatur bahwa sanksi administrasi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada personel Kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, sudah berkekuatan hukum, dan atas pertimbangan atasan.

Oleh karenanya, ia menekan, dalil atas pertimbangan atasan dalam pelaksanaan sidang etik Napoleon seharusnya memiliki standar etik dan moral yang tinggi. Apalagi, Napoleon juga sudah menjalankan hukuman pidana penjaranya serta memasuki bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur sejak 17 April 2023.

Selama masa penahanan itu, kata dia, Napoleon tentu tetap mendapat gaji tanpa kerja dari uang rakyat.

"Hasil sidang KKEP tersebut juga menunjukkan bagaimana permisifitas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pada personelnnya (terutama elit kepolisian) yang melakukan pelanggaran hukum," imbuhnya. • **Ius**

HUT KE-75 POLWAN

Polri Ungkap Peran Penting Polisi Wanita Kawal Pemilu Damai 2024

JAKARTA (IM) - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo sebut peran Polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.

"Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinakamtimas, di TPS," kata Dedi dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8).

Desi menyebut, Polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinakam-

timas sangat diapresiasi. Jajaran Polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut menantang serta menghadapi tantangan. Lebih lanjut, Dedi menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan Pilkada dan sengketa Pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.

"Pembekalan pemilu ini teman-teman harus pahami agar selalu siap," ujar Dedi.

Jenderal Bintang Dua itu juga mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar seluruh jajaran selalu me-

nambah dan menekankan kompetensi.

Bahkan, Dedi memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri. Dalam penekanan Jenderal Sigit, seluruh anggota harus memiliki kompetensi etik. Kemudian, yang kedua kompetensi teknis.

"Ketiga, kompetensi leadership. Meski perempuan harus bisa mimpin, baik itu diri sendiri, satuan kamu, sampai nanti kamu dikasih kesempatan mimpin seperti bu Ida Utari," kata Dedi. • **Ius**

FOTO: ANTARA



POLDA RIAU BERI BANTUAN SUMUR BOR UNTUK MASYARAKAT

Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyerahkan bantuan secara simbolis berupa sumur bor dan pompa air kepada warga dalam rangka Bakti Polri untuk Negeri di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/8). Polda Riau pada kegiatan Bakti Polri untuk Negeri memberikan bantuan pengadaan fasilitas 23 sumur bor dan 15 alat pompa air untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Pesulap OA dan AH Tanam Ganja Terancam Hukuman Mati

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pesulap OA dan AH terancam hukuman mati. Keduanya diduga menanam ganja.

"Pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (1) sub Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati," ujarnya di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8).

Penangkapan pesulap berinisial IAS alias OA dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat atas kepemilikan ganja. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan biji hingga pohon ganja yang tumbuh subur. Selain itu, juga diamankan tersangka lain berinisial AH.

"Dari hasil pengungkapan berhasil diamankan 2 orang tersangka atas nama inisial AH dan IAS alias OA, tempat kejadian berada di kawasan Serpong Tangerang Selatan, provin-

si Banten," ujar Syahduddi.

Dalam penangkapannya, sambung Syahduddi, pesulap juga menyita tiga botol biji ganja hingga lima pot pohon ganja dari kedua pelaku.

"Dari AH ini didapatkan barang bukti 3 botol biji ganja, kemudian menemukan lima pot tanaman ganja, di mana dari lima pot ini tanaman ganja ini terdiri dari 2 pot ukuran kecil dan 3 pot ukuran besar," ujarnya.

Dari pelaku OA, penyidik berhasil mengamankan tiga klip biji ganja dengan berat kurang lebih 17,62 gram, kemudian 1 klip ganja dengan berat 0,58 gram dan dengan berat kurang lebih 17,62 gram.

"Kemudian 1 klip ganja dengan berat 0,58 gram, 13 puntung ganja bekas pakai oleh pelaku, kemudian satu alat Linting Ganja, satu alat grinder, 10 pack paper atau kertas rokok, dan 1 Kg pupuk hidroponik yang disimpan di dalam lemari belakang rumah saudara OA," ujarnya. • **Ius**